

# **PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. BIAS NUSATAMA PEKANBARU**

**Oleh :**

**Nadila Oktaviani**

**Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.si**

*(e-mail : [nadilaoktaviani11@yahoo.co.id](mailto:nadilaoktaviani11@yahoo.co.id))*  
081268382023

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*Occupational health and safety program is one of an important part that should be introduced in project implementation in the field of well service and the warehouse. The risk of an accident and occupational disease often occurred because of human resources who do not implement the occupational health and safety program well. However this can impact on decreasing productivity level of workers and losses to Company.*

*This research aims to know about the implementation of occupational health and safety program and the factors that affect the implementation OHS program in PT. Bias Nusatama Pekanbaru. This research using methods descriptive qualitative with data collecting technique in the form of an interview, observation and a study literature.*

*Research of the results is the implementation of occupational health and safety program in PT. Bias Nusatama Pekanbaru not run well this is because the disobedience of employees against the rules given and not running of routine procedures and not the achievement of the goal of the program which is zero accident. Factors that affect the implementation of OHS is the minimum of quantity a human resources which owned by the Company and Department of Labor and bureaucratic structure that does not run efficiently by employees in carrying out standart operating procedure (SOP).*

*Keywords : Occupational Health and Safety, Program, Routine Procedure*

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini masalah keselamatan kerja semakin menjadi perhatian dan keinginan berbagai pihak yang terkait karena dianggap begitu penting dan berharga. Kebutuhan akan keselamatan kerja terletak pada kenyataan bahwa angka kecelakaan dalam kegiatan produksi masih tinggi dan mengkhawatirkan yang kemudian berakibat pada banyaknya orang mengalami cedera. Menyadari akan pentingnya memelihara keselamatan para pekerja maka diperlukan tindakan-tindakan preventif dan protektif yang akurat dan cermat terhadap setiap tenaga kerja yang terlibat dalam semua tahap proses produksi yang melingkupi dimensi-dimensi cukup luas antara lain keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan karena dengan terlindungnya keselamatan mereka akan menguntungkan bagi sebuah perusahaan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan terbentuknya kehidupan kerja yang berkualitas.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan tidak selamat atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan pada dasarnya tidak dapat diduga dan bisa terjadi kapan saja dimana saja. Setiap tempat kerja memiliki resiko kecelakaan bagi tenaga kerja, seperti kebakaran, jatuh

dari tempat tinggi, tergelincir dan lain sebagainya. Akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut dapat berupa kerugian materil, cedera kecil hingga kematian. Penyebab kecelakaan inipun bisa beragam, bisa disebabkan oleh kelalaian manusia, kondisi lingkungan yang tidak aman, alam, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan suatu usaha pencegahan dan penanganan yang baik terhadap kecelakaan yang mungkin dapat terjadi, dengan demikian akibat negatif yang dapat timbul bisa diminimalisasi atau dihilangkan.

Dalam hal ini tenaga kerja membutuhkan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan aktivitas bekerja, sehingga dapat dirancang suatu usulan acuan pengembangan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah. Instansi yang terkait Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan "Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien sehingga proses produksi berjalan lancar". Tidak hanya itu UU No. 23 tahun 1992 juga membahas tentang kesehatan kerja yang menyatakan "Bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan

yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. PT. Bias Nusatama Pekanbaru merupakan perusahaan penunjang yang bergerak dalam bidang penyedia jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia dan Perusahaan-Perusahaan di lingkungan Minyak dan Gas. Perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan dengan tingkat resiko tinggi, ini terlihat dari proses produksi yang menggunakan mesin-mesin berteknologi sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Maka dari itu PT. Bias Nusatama telah berkomitmen dan mendukung program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya dengan cara penyediaan alat-alat dan sarana perlindungan diri bagi tenaga kerja seperti helm, masker, baju pengaman, dan sepatu. Adapun program-program yang dimiliki PT. Bias Nusatama Pekanbaru antara lain pengontrolan bahaya (*hazard control*), pencegahan cedera, pencegahan kecelakaan bermotor, meningkatkan perilaku selamat, perlindungan lingkungan, kehandalan (*reability*) dan efisiensi peralatan, perlengkapan APD dan alat keselamatan, pelatihan (*training*), meningkatkan motivasi, dan kepemimpinan

PT. Bias Nusatama Pekanbaru mempunyai 2 bidang pekerjaan (*scope of work*) yaitu bidang *well Service* dan bidang *warehouse*. *well service* adalah suatu bagian yang bertugas menangani segala kegiatan yang berhubungan dengan sumur. Kegiatan tersebut meliputi usaha agar sumur siap berproduksi, sedangkan *warehouse* (pergudangan) adalah tempat penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan

rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan dimana aktivitas yang dilakukan seperti penerimaan barang, penyusunan barang dan pengaturan material di dalam rak.

**Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Kerja Di PT. Bias Nusatama Pekanbaru**

Tahun	Proyek Warehouse		Proyek Well Service	
	Jumlah karyawan	Kecelakaan	Jumlah karyawan	Kecelakaan
2011	132	2	182	8
2012	132	0	182	6
2013	146	0	182	4
Jumlah		2		18

Sumber : PT. Bias Nusatama Pekanbaru

Pada tabel 1. diatas menunjukkan jumlah kecelakaan yang terjadi pada bidang *Warehouse* dan *Well Service* pada tahun 2011-2013. Berdasarkan analisa dari Dinas Ketenagakerjaan mengenai tingkatan kecelakaan kerja dapat dilihat dari rumus tingkat kekerapan kecelakaan/frequency rate (*fr*) yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah kecelakaan} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam kerja orang}}$$

Maka dapat disimpulkan kecelakaan kerja di PT. Bias Nusatama pada tahun 2011-2013 menunjukkan kekerapan kecelakaan/frequency rate (*fr*) rata-rata 2,433 pada bidang *Warehouse* dan 15,880 pada bidang *Well service*. Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang sudah dikemukakan, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Bias Nusatama Pekanbaru”.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian sebelumnya, maka masalah dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Bias Nusatama Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Bias Nusatama Pekanbaru?

### **TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Bias Nusatama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Bias Nusatama Pekanbaru.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu, terutama dalam ilmu administrasi negara khususnya yang membahas tentang kebijakan publik.
- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana program K3.

c. Secara Akademis, sebagai bahan informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama dalam waktu dan tempat yang berbeda.

### **KONSEP TEORI**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Model **George Edward III dalam Nugroho (636: 2009)** menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack Of Attention To Implementation*. Dikatakannya *Without effective Implementation the decision of policy makers willnot be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar Implementasi kebijakan berjalan efektif, yaitu:

1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya pendukung seperti khususnya sumber daya manusia. Hal berkenaan dengan kecakapan

pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

3. Sikap yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut yang didukung dengan komitmen di dalamnya.

4. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

**Nakamura dan Smallwood dalam sujianto (2008)** mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

1. Perspektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandate/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.

2. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaannya program dan tidak adanya konflik. Kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program darisegi proses.

3. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Lokasi penelitian

ini dilaksanakan di PT. Bias Nusatama Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Pengawas Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bagian *Human Resource Departement* (HRD), Manager HES dan Karyawan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer yaitu data yang dipih langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Data primer ini dapat diperoleh dari Kepala Bagian *Human Resource Departement* (HRD) dan Manager HES. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Penyajian data dengan wawancara, observasi dan studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Bias Nusatama Pekanbaru.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek seperti tujuan, kegiatan dan aturan-aturan. Maka dengan program segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan maka dari itu perlu adanya keberhasilan pelaksanaan program dalam kaitannya dengan pelaksanaan program K3 pada

penelitian ini. Adapun langkah-langkah atau kriteria keberhasilan pelaksanaan program yaitu :

#### 1. Kepatuhan Birokrat Bawahan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan, baik kepatuhan bawahan kepada atasan atau kepatuhan implementor terhadap peraturan dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan birokrat bawahan kepada birokrat atasannya dalam hal ini belum berjalan secara maksimal. Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan serta pengawasan telah melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan keselamatan dan kesehatan kerja serta undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja kepada setiap perusahaan. Perusahaan dalam hal ini Manager HES juga telah menerapkan aturan-aturan dan undang-undang yang telah disosialisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta telah mensosialisasikan kepada setiap karyawan terkait aturan keselamatan dan kesehatan kerja seperti penggunaan alat pelindung diri dan SOP dalam bekerja, hanya saja dalam pelaksanaannya ketaatan mengenai aturan belum ditaati sepenuhnya oleh karyawan secara menyeluruh.

#### 2. Berfungsinya prosedur-prosedur rutin

Pada perspektif ini program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksana, tugas-tugas yang diberikan, tindakan yang dilakukan dan penetapan sanksi-

sanksi. Prosedur-prosedur rutin seperti tugas-tugas yang diberikan, tindakan yang dilakukan serta himbauan atau peringatan dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada Perusahaan sudah berjalan, seperti adanya pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan-aturan keselamatan dan kesehatan kerja namun apabila Perusahaan tidak mentaati prosedur yang diberikan maka Dinas Tenaga Kerja memberikan nota pemeriksaan yang merupakan peringatan sekaligus teguran dan apabila Perusahaan masih tidak mentaati juga maka dilakukan penyidikan sampai ke pengadilan dan dikenai sanksi pidana tiga bulan penjara. PT. Bias Nusatama dalam hal ini sudah melaksanakan prosedur-prosedur yang telah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan menghimbau karyawan untuk selalu berpedoman pada SOP setiap melakukan pekerjaan. Berbeda halnya dengan hasil wawancara oleh karyawan, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur-prosedur rutin yang diberikan Perusahaan tidak terlaksana masih banyak karyawan yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Karyawan seharusnya mematuhi semua aturan, ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memahami setiap pekerjaan berdasarkan disiplin kerja sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi kecelakaan dalam bekerja. Maka pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan dalam berjalannya prosedur-prosedur rutin dapat dikatakan cukup baik hanya saja dalam hal ini masih banyak karyawan yang tidak disiplin

dalam menerapkan tugas-tugas dan aturan yang diberikan.

### 3. Pencapaian tujuan program

Keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program. Program dapat dinilai berhasil manakala tujuan dari program tersebut membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan ataupun sebaliknya. pencapaian tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat tercapai apabila pihak-pihak dari pelaksana sendiri dapat menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja. Pencapaian tujuan program dalam hal ini berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Perusahaan dapat tercapai apabila tujuan dari program tersebut dilaksanakan dan harapan yang diinginkan dari pencapaian tujuan program tersebut adalah nihil kecelakaan (*zero accident*). Hal berbeda disampaikan oleh hasil wawancara karyawan PT. Bias Nusatama Pekanbaru, dalam hal ini pencapaian tujuan program dikatakan belum mencapai tujuan yang diinginkan, masih ada beberapa kecelakaan yang terjadi saat bekerja. Sehingga pelaksanaan program dalam pencapaian tujuan-tujuan program dapat dikatakan belum mencapai harapan dan dampak yang diinginkan oleh semua pihak.

### B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keselamatan

dan Kesehatan Kerja di PT. Bias Nusatama Pekanbaru.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah bagaimana suatu kebijakan disalurkan, keputusan-keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Jika komunikasi tidak mampu diberikan secara jelas dan optimal maka dampaknya akan kepada pelaksana kebijakan yang tidak mau peduli dan tidak mau berpartisipasi. Namun dalam hal ini penyampaian informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan sudah berjalan dengan lancar dan penyampaian informasi yang diberikan oleh Perusahaan juga sudah disampaikan rutin kepada karyawan. Karyawan mengetahui informasi yang diberikan Perusahaan dengan sangat jelas dan informasi yang diberikan Perusahaan juga telah rutin disampaikan.

#### 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan rutin tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia yakni berkaitan dengan jumlah tenaga kerja apakah sudah cukup untuk melingkupi kelompok sasaran. Seperti yang dapat dilihat dari Dinas Tenaga Kerja, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan program K3 dalam mencapai *zero accident*, karena secara kuantitas sumber daya manusia

yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja sangatlah kurang. Kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga kerja pengawas ini menyebabkan banyak perusahaan yang tidak terawasi sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan apakah sudah berjalan atau belum. Selain itu sumber daya financial, sarana, prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja terbilang minim. Kurangnya sarana, prasarana dan dana yang dialokasikan menyebabkan pelaksanaan tidak berjalan maksimal dan berdampak dalam pelaksanaan program K3 tidak hanya Dinas Tenaga Kerja namun perusahaan pun dalam hal ini serba bercukupan sehingga karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tidak berjalan efektif.

### 3. Disposisi/Sikap

Sikap atau disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki implementor seperti pemahaman dan pengetahuan serta motivasi yang diberikan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sehubungan dengan hal ini faktor sikap/disposisi berupa pemahaman dan pengetahuan serta motivasi sudah berjalan efektif baik dari Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan dan Karyawan.

### 5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). Standar operasional prosedur menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Standar operasional prosedur yang diberikan Perusahaan telah berjalan hanya saja dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Bias Nusatama Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan :

1. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Bias Nusatama Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan, baik kepatuhan bawahan kepada atasan atau kepatuhan implementor terhadap peraturan dalam mengimplementasikan sebuah program. Dalam hal ini kepatuhan bawahan kepada atasannya tidak berjalan, dikarenakan dalam pelaksanaan aturan-aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja karyawan tidak mentaati aturan-aturan yang telah diberikan. Selain itu tidak berjalannya prosedur-prosedur rutin dikarenakan ketidaksiplinan karyawan dalam menerapkan SOP yang mengakibatkan tidak tercapainya

tujua-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program yaitu nihil kecelakaan (*zero accident*).

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dari pelaksanaan program K3 di PT. Bias Nusatama Pekanbaru ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sumber daya, baik sumber daya manusia dimana kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja maupun Perusahaan sehingga perlu ditingkatkan agar pencapaian program K3 dapat berjalan maksimal. Berikutnya sumber daya financial, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perusahaan terbilang minim. Kurangnya sarana, prasarana dan dana yang dialokasikan menyebabkan pelaksanaan tidak berjalan efektif. Berikutnya adalah struktur birokrasi. Implementasi masih bisa jadi belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada yang dapat dilihat dari SOP pelaksanaan program K3. Dalam hal ini perlunya kesadaran karyawan dalam melaksanakan SOP yang telah diberikan agar implementasi berjalan dengan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

**Dunn, N. William.** 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University.

**Flippo, E.B.** 2002. *Manajemen Personalia*. Alih Bahasa Moh. Mas'ud. Jakarta: Erlangga.

**Nawawi, Ismail.** 2007. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: NM.

-----, 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori danPraktek*, Surabaya: PMN

**Nogi, Hessel Tangkilisan.** 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.

**Nugroho,Riant.** 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Alex Media Komputindo.

-----, 2009.*Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo.

**O. Jones, Charles** 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali : Jakarta.

**Parson, Wayne.** 2005. *Public policy*. Jakarta: Prenada Media Group.

**Purwanto, Erwan Agus.**2012.*Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GayaMedia

**Reese, C.D.** 2009. *Industrial Safety and Health For Administartive Services*. CRC. Press. United States of America.

**Suharto, Edi.** 2008. *Analisis Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta.

**Sujianto.** 2008.*Implementasi kebijakan public konsep teori dan praktik.*Pekanbaru : Alaf Riau.

**Sumaryadi. Nyoman.** 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Jakarta.